



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
SOP/UPM/DJBM-54**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arie Setiadi Moerwanto'.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	2
4.2. Aplikasi KRISNA	2
4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	2
4.4. Program	2
4.5. Kegiatan	2
4.6. Pagu Indikatif	3
4.7. Pagu Anggaran K/L	3
4.8. Angka Dasar (<i>Base Line</i>)	3
4.9. Inisiatif Baru	3
4.10. Kerangka Pengeluaran Janghka Menengah (KPJM)	3
4.11. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	3
4.12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	4
4.13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	4
4.14. Indikator Kinerja Program (IKP)	4
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	4
5.1. Ketentuan Umum	4
5.1.1. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	4
5.1.2. Syarat Penyusunan Renja	4
5.1.3. Informasi Kinerja Dalam Renja	5
5.1.4. Program dan Pengalokasian Anggaran	5

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.5.	Urutan Prioritas Pendanaan	5
5.1.6.	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	6
5.1.7.	Telaah Kesesuaian Terhadap Renstra	6
5.1.8.	Menu Aplikasi KRISNA	6
5.1.9.	Tujuan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)	7
5.2.	Rincian Prosedur	8
1.	Mengumpulkan Data dan Informasi	8
2.	Menyusun Usulan Program	8
3.	Kompilasi Usulan Program Ditingkat Subdit/Balai	8
4.	Rapat Koordinasi Usulan Program	8
5.	Kompilasi Usulan Program Ditingkat Direktorat	8
6.	Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra konreg)	8
7.	Pelaksanaan Konsultasi Regional (konreg)	9
8.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	9
6.	Kondisi Khusus	9
7.	Bagan Alir	10
8.	Bukti Kerja	11
9.	Lampiran	11

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 22

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan proses penyusunan Program dari tingkat Satker Balai dan Satker Pusat, tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

3. Acuan

- 3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017, tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 3.3. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2017, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- 3.4. Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L), Bappenas Tahun 2017
- 3.5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.
- 3.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.8. Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
- 3.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 22

3.10 Buku Panduan Konsultasi Regional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun berjalan.

4. Definisi

4.1. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

(PP RI No. 90 Tahun 2010 pasal 1 angka 7)

4.2. Aplikasi KRISNA

Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) adalah integrasi antara 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja.

4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.

(PP No. 90 Tahun 2010 pasal 1 angka 8)

4.4. Program

Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Unit Eselon I atau Unit Kementerian/Lembaga berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.8)

4.5. Kegiatan

Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan Indikator Kinerja yang terukur.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.9)

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 22

4.6. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 10)

4.7. Pagu Anggaran K/L

Pagu Anggaran Kementerian Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 11)

4.8. Angka Dasar (*Base Line*)

Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 21)

4.9. Inisiatif Baru

Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maju yang berupa program, kegiatan, Keluaran (*Output*) Program/Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan/atau komponen.

(Permen Keuangan No. 94/PMK.02/2017 pasal 1 angka 22)

4.10. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut KPJM, adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.25)

4.11. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 22

(PP RI No. 90 tahun 2010 pasal 1 ayat 6)

4.12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab I.E.10)

4.14. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.

4.15. Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu kegiatan.

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1. Ketentuan Umum

5.1.1. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

- Perencanaan kegiatan tahunan oleh kementerian dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian serta disusun mengacu pada RKP.
- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang didalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Kementerian.
- Matrik Rencana Tindak Kementerian merupakan rencana program dan kegiatan Kementerian berdasarkan Pagu Indikatif.

(Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Tahun 2017)

5.1.2. Syarat Penyusunan Renja

1. Penyusunan Renja berpedoman pada Rancangan Awal RKP.
2. Target Kinerja yang ditetapkan merupakan Rencana Kerja dari Kementerian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian dan/atau penugasan Prioritas Pembangunan Nasional.

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 22

(Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Tahun 2017)

5.1.3. Informasi Kinerja Dalam Renja

Informasi kinerja yang ada dalam Renja K/L meliputi :

- a. Visi dan Misi K/L, Sasaran Strategis K/L, dan Misi unit Eselon I;
- b. Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator Kinerja Program (IKP);
- c. Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- d. Perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan majunya;

Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra K/L.

(Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Tahun 2017)

5.1.4. Program dan Pengalokasian Anggaran

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian seluruhnya dalam rangka pelaksanaan tugas-fungsi Kementerian dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
- b. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

(Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Tahun 2017)

5.1.5. Urutan Prioritas Pendanaan

Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 22

pembangunan yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, Renstra K/L tahun 2015-2019, dan Rancangan Awal RKP tahun berkenaan;

- b. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama;
- c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
- d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears);
- e. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan daerah tertinggal, perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah serta isu lainnya terkait kewilayahan;
- f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.

(Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Kementerian, Tahun 2017)

5.1.6. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Koordinasi penyusunan Rencana Kerja pada Satker Pusat di lakukan oleh Subdit Pemrograman dan pada Satker Balai dilakukan oleh Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan.

5.1.7. Telaah Kesesuaian Terhadap Renstra

Kementerian melakukan penelaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden untuk tahun direncanakan dan membandingkan dengan Renstra Kementerian.

(Permen PPN No. 1 tahun 2011 Bab IV.A.2.a)

5.1.8. Menu Aplikasi KRISNA

Secara umum terdapat beberapa menu dalam aplikasi, yaitu:

- a. Visi & Misi : menampilkan, menginput, mengubah dan menghapus informasi tentang visi dan misi dari K/L;
- b. Sasaran Strategis : menampilkan, menginput, mengubah, dan menghapus informasi tentang Sasaran Strategis dari K/L beserta

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 22

indikatornya;

- c. Program & Kegiatan : menampilkan, menginput, mengubah, dan menghapus informasi tentang Program dan Kegiatan dari K/L;
- d. Rekapitulasi : menampilkan rekapitulasi Program dan Kegiatan yang telah diinput oleh K/L;
- e. Treeview : menampilkan informasi susunan kode dan nomenklatur kegiatan, *output*, *su output*, dan komponen per Program yang telah diinput oleh K/L;
- f. Timeline : menampilkan informasi tentang alur penyusunan Renja K/L;
- g. Manual : menampilkan informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi KRISNA; dan
- h. FAQ : menampilkan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna beserta.

5.1.9. Tujuan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)

Tujuan Pra Konreg adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi awal Isu-isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun $n + 1$ sebagai bahan masukan Konreg;
2. Identifikasi awal Rencana Aksi Pencapaian Output/Pekerjaan Strategis dalam RPJMN Bidang PUPR dan/atau Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai bahan masukan Konreg;
3. Konsolidasi program tahun $n+1$ antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.
4. Mensinkronkan, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun $n+1$ sebagai bahan masukan Konreg.

(Sumber : Panduan Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional/Konsultasi Regional Kementerian PUPR)

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 22

5.2. Rincian Prosedur

1. Mengumpulkan Data dan Informasi

Subdit Terkait, Bidang/Seksi/Bagian mengumpulkan data sebagai bahan untuk menyusun usulan program antara lain, Renstra, Penyelesaian Target RPJM, Direktif Presiden, Kegiatan Prioritas Nasional, dls.

2. Penyusunan Usulan Program

Masing-masing Subdit, Bidang/Seksi/Bagian menyusun Usulan Program berdasarkan data dan informasi yang tersebut pada butir 1.

3. Kompilasi Usulan Program Ditingkat Subdit/Balai

Subdit Pemrograman pada Direktorat Terkait, Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan pada Balai melakukan kompilasi usulan program yang telah disusun oleh masing-masing Subdit, Bidang/Seksi dan Bagian/Subbagian.

4. Rapat Koordinasi Usulan Program

- a. Direktur terkait/Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memimpin pembahasan Usulan Program dengan melibatkan seluruh jajarannya yang terdiri atas Subdit, Bidang/Seksi dan Bagian/Sub Bagian dan seluruh Staf yang dianggap perlu.
- b. Direktur terkait/Kepala Balai melakukan analisis kesesuaian Usulan Program, dengan memperhatikan sasaran Unit Kerjanya.
- c. Direktur terkait/Kepala Balai memberikan saran, koreksi dan rekomendasi atas Usulan Program.
- d. Seluruh jajaran Direktorat/BBPJN/BPJN melakukan perbaikan dan koreksi ditempat, dan hasilnya disepakati sebagai produk akhir usulan Program.

5. Kompilasi Usulan Program Ditingkat Direktorat

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan melakukan kompilasi Usulan Program hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Terkait/Balai.

6. Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra konreg)

Prakonreg dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal guna mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan Penyiapan

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 22

Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal.

Keluaran Prakonreg adalah Bahan Renja Direktorat Jenderal kemudian disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal sebagai bahan untuk pembahasan dalam Konsultasi Regional (Konreg).

7. Pelaksanaan Konsultasi Regional (konreg)

Konreg dilaksanakan pada tingkat Kementerian guna mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui sinkronisasi Program serta Penyusunan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keluaran Konreg adalah Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

8. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Direktorat Jenderal Bina Marga menyusun Rencana Kerja dengan menggunakan Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi RKA KL.

Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan Hasil Konsultasi Regional, Pagu Indikatif, Rancangan Awal RKP dan Kebutuhan Awal (Belanja Mengikat, *Committed, Preservasi*, Prioritas Nasional).

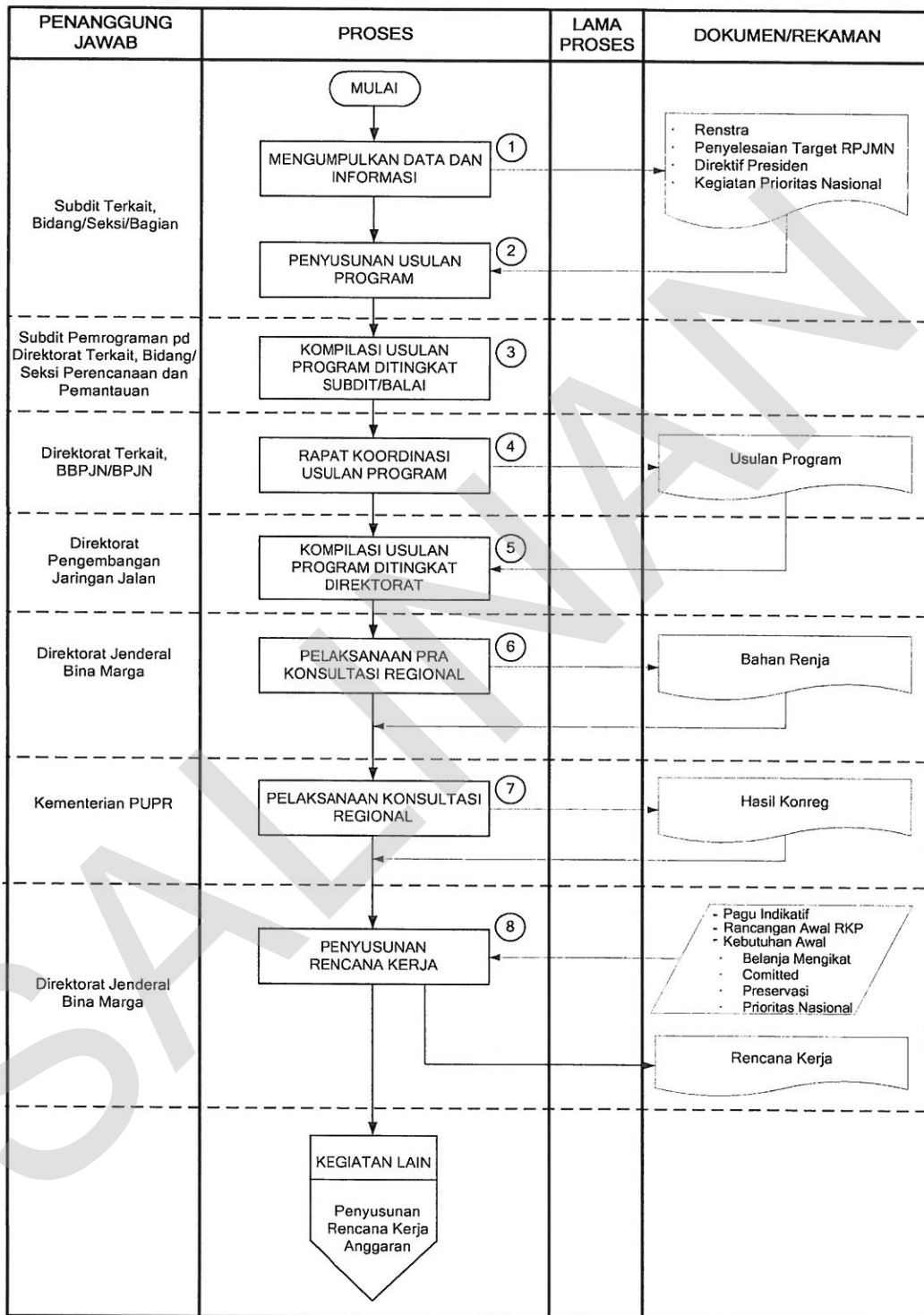
6. Kondisi Khusus

Tidak ada.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 22

7. Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja Tahunan



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 22

8. Bukti Kerja

- 8.1. Rencana Kerja Unit Organisasi Eselon I.
- 8.2. Rencana Kerja Unit Organisasi Eselon II.
- 8.3. Notulen Rapat Pembahasan Rencana Kerja.
- 8.4. Bahan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian.
- 8.5. Usulan Inisiatif Baru.

9. Lampiran

- 9.1 Formulir 1 (Contoh) : Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 20..
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.2 Formulir 2 (Contoh) : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran 20..
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.3 Formulir 3 (Contoh) : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 20..
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.4 Bahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Contoh).
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.5 *Usulan Inisiatif Baru* (Contoh).
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.6 Form Penilaian Usulan Kegiatan Fisik TA. 20.. (Contoh)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)
- 9.7 Daftar Simak.
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 22

Lampiran 9.1

Formulir 1 (Contoh)

Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 20..

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

1. Kementerian/Lembaga :
2. Visi :
3. Misi : 1.
2.
3.dst

4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 2017 (Juta rupiah)
(1)	(2)	(3)
99	Prioritas Nasional 1	999
99	Prioritas Nasional 2	999
99	...dst	999
Jumlah		999

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L	Target 2017	Alokasi 2017 (Juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	Sasaran Strategis 1			999
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.	999	
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2.	999	
99	Sasaran Strategis 2			999
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.	999	
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.	999	
Jumlah				999

6. Program dan Pendanaan

Kode	Program	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta rupiah)					Praktiran Kebutuhan (Juta rupiah)		
		Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)
99	Program A	999	999	999	999	999	999	999	999
99	Program B	999	999	999	999	999	999	999	999
99	Program C	999	999	999	999	999	999	999	999
Jumlah		999	999	999	999	999	999	999	999

Jakarta,20xx
a/n Menteri/Kepala Lembaga

(.....)
NIP :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 22

Lampiran 9.2

Formulir 2 (Contoh)

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran 20..

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

1. Kementerian/Lembaga :
2. Sasaran Strategis K/L yang didukung : 1.
2.
3. dst
3. Program :
4. Unit Organisasi (Eselon 1) :
5. Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target 2017	Alokasi 2017 (juta rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) A.1.			999
		Indikator Kinerja Program A.1.1.	999	
		Indikator Kinerja Program A.1.2.	999	
99	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) A.2.			999
		Indikator Kinerja Program A.2.1.	999	
		Indikator Kinerja Program A.2.2.	999	
Jumlah				999

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta rupiah)					Prakiraan Kebutuhan (juta rupiah)		
		Rupiah	PLHN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)
99	Kegiatan 1	999	999	999	999	999	999	999	999
99	Kegiatan 2	999	999	999	999	999	999	999	999
99	Kegiatan 3	999	999	999	999	999	999	999	999
Jumlah		999	999	999	999	999	999	999	999

Jakarta,20xx
a/n Menteri/Kepala Lembaga

(.....)
NIP :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 22

Lampiran 9.3

Formulir 3 (Contoh)

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 20..

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

1. Kementerian/Lembaga :
2. Program :
3. Sasaran Program yang didukung : 1.
2.
3. dst
4. Kegiatan :
5. Unit Organisasi (Eselon 2) :
6. Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Pendanaannya :

Kode	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2017	Alokasi 2017 (juta rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Dukungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
99	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) 1.1.			999	xxx	xxx	xxx	PPP/ARG/KSST/ MPI/API/ PPBAN/RB
		Indikator Kinerja Kegiatan 1.1.1.	999					
		Indikator Kinerja Kegiatan 1.1.2.	999					
99	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) 1.2.			999	xxx	xxx	xxx	PPP/ARG/KSST/ MPI/API/ PPBAN/RB
		Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.1.	999					
		Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.2.	999					
Jumlah				999				

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Kode	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Komponen	Tahun 2017			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan Biaya	Jumlah Alokasi (juta rupiah)	Volume			Jumlah Alokasi (juta rupiah)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) 1.1.	999		999	999	999	999	999	999	999
	xx1 Komponen 1	999	999	999						
	xx2 Komponen 2	999	999	999						
99	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) 1.2.	999		999	999	999	999	999	999	999
	xx1 Komponen 1	999	999	999						
	xx2 Komponen 2	999	999	999						
Jumlah				999				999	999	999

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 22

B. Sumber Pendanaan

Kode	Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (juta rupiah)				
			Rupiah	PHLN+PDN	PNBP+BLU	SBSN	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
99	Sasaran Kegiatan (Output) 1.1.		999	999	999	999	999
	xx1 Komponen 1	BAK/BLK	999	999	999	999	999
	xx2 Komponen 2	BAK/BLK	999	999	999	999	999
99	Sasaran Kegiatan (Output) 1.2.		999	999	999	999	999
	xx1 Komponen 1	BAK/BLK	999	999	999	999	999
	xx2 Komponen 2	BAK/BLK	999	999	999	999	999
	Jumlah		999	999	999	999	999

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

Kode	Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen	Sumber/Loan	Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (juta rupiah)							
			Jenis PHLN (P/H/KE)	Pagu (Sesuai MUA)	Penyerapan s/d Desember 2015	Tanggal Mulai	Tanggal Tutup	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99	Sasaran Kegiatan (Output) 1.1.			999	999					
	xx1 Komponen 1	xxx	(P/H/KE)	999	999	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	999	999	999
	xx2 Komponen 2	xxx	(P/H/KE)	999	999	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	999	999	999
99	Sasaran Kegiatan (Output) 1.2.			999	999					
	xx1 Komponen 1	xxx	(P/H/KE)	999	999	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	999	999	999
	xx2 Komponen 2	xxx	(P/H/KE)	999	999	{dd/mm/yy}	{dd/mm/yy}	999	999	999
	Jumlah				999			999	999	999

Jakarta,.....20xx
a/n Menteri/Kepala Lembaga

(.....)
NIP :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 22

Lampiran 9.4

Bahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Contoh)
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

PROVINSI :

FORMAT-2 PRA KONREG/KONREG 20....

Dana dalam Juta Rupiah

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub-Output	Lokasi		Estimasi outcome		Kriteria Kesiapan					Satuan Volume Output	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh		Rencana Tahun 20....				Prakiraan Maju				Ket. Kegiatan Pusat/Dekon/T P/UB/Multi years			
			Kab./Kota	Detil Lokasi: Kec./Kws/Ruas	Jumlah Penduduk Pemanfaatan	Luas Wilayah Tertangani (Ha)	Perencanaan	FS	Amdal	Tahun Kesiapan DED	Tahun Kesiapan Lahan		Pasca Konstruksi	Vol	Total Biaya	Vol.	Biaya Rp	PHLN	Jml	Tahun 20....		Tahun 20....		Tahun 20....		
																				Vol.	Biaya	Vol.		Biaya	Vol.	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	xxx	Program.....																								
	xxx	Kegiatan.....																								
1	xxx	Output.....	xxx	xxx																						
	xxx	Output.....																								
2	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
3	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
	xxx	Kegiatan-2.....																								
	xxx	Output.....																								
4	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
5	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
6	xxx	Output.....	xxx	xxx																						
		Dan seterusnya.....																								
		TOTAL																								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 22

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 2 : diisi kode program/kegiatan/output/sub-output (sesuai struktur anggaran pada aplikasi RKA-KL. Dapat di download melalui www.pu.go.id)
- Kolom 3 : diisi nama program, kegiatan, output, dan sub-output (jika ada) (sesuai struktur anggaran pada aplikasi RKA-KL. Dapat di download melalui www.pu.go.id)
- Kolom 4 dan 5 : diisi pada baris Sub-output atau Output (jika tidak ada sub-output). Jika terdapat lebih dari 1 lokasi untuk 1 output/sub-output, agar mengulangi penulisan nama output/sub-output pada kolom 2.
- Kolom 6 dan 7 : diisi berdasarkan estimasi outcome yang akan dicapai. Jumlah penduduk pemanfaat dalam satuan dan luas wilayah tertangani dalam hektar.
- Kolom 8 : diisi siap atau tidaknya Strategi/Rencana Pembangunan infrastruktur dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, termasuk Struktur Ruang Wilayah dalam RTRW.
- Kolom 9 dan 10 : diisi tahun selesainya penyusunan Studi Kesiapan (Feasibility Study) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- Kolom 11 dan 12 : diisi tahun selesainya penyusunan DED dan tahun siapnya lahan yang dibutuhkan.
- Kolom 15 dan 16 : diisi volume dan total biaya sampai output selesai dihasilkan secara menyeluruh.
- Kolom 17, 18, 19, dan 20 : diisi volume beserta biaya rupiah murni dan PHLN untuk pelaksanaan tahun 20...
- Kolom 21 dan 22 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20.. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 23 dan 24 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 25 dan 26 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 4-13 dan 15-16 : diisi untuk pekerjaan fisik.
- Kolom 27 : diisi keterangan Output terkait merupakan Kegiatan Pusat (Pusat) / Dekonsentrasi (Dekon) / Tugas Pembantuan (TP) / Urusan Bersama (UB) / Multiyears (MYC).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku : 22 Januari 2018
Nomor Revisi : 00	Halaman : 18 dari 22

Lampiran 9.5

Usulan Inisiatif Baru (Contoh)
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

PROVINSI :

FORMAT-3 PRA KONREG/KONREG 20....

Dana dalam Juta Rupiah

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub-Output	Lokasi		Esimasi outcome		Kriteria Kesiapan					Satuan Volume Output	Kebutuhan Penanganan Menyeluruh		Rencana Tahun 20....					Prakiraan Maju				Ket. Kegiatan Pusat/Dekon/T P/UB/Multi years		
			Kab./Kota	Detil Lokasi: Kec./Desa/Kel./Kws/Ruas	Jumlah Penduduk Pemanfaatan	Luas Wilayah Tertangani (Ha)	Perencanaan	FS	Amdal	Tahun Kesiapan DED	tahun Kesiapan Lahan		Pasca Konstruksi	Vol	Total Biaya	Vol.	Biaya Rp	PHLN	Jml	Thn 20....		Thn 20....			Thn 20....	
																				Vol.	Biaya	Vol.	Biaya		Vol.	Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	xxx	Program.....																								
	xxx	Kegiatan.....																								
1	xxx	Output.....	xxx	xxx																						
	xxx	Output.....																								
2	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
3	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
	xxx	Kegiatan-2.....																								
	xxx	Output.....																								
4	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
5	xxx	Sub-Output.....	xxx	xxx																						
6	xxx	Output.....	xxx	xxx																						
		Dan seterusnya.....																								
TOTAL																										

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 22

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 2 : diisi kode program/kegiatan/output/sub-output (sesuai struktur anggaran pada aplikasi RKA-KL. Dapat di download melalui www.pu.go.id)
- Kolom 3 : diisi nama program, kegiatan, output, dan sub-output (jika ada) (sesuai struktur anggaran pada aplikasi RKA-KL. Dapat di download melalui www.pu.go.id)
- Kolom 4 dan 5 : diisi pada baris Sub-output atau Output (jika tidak ada sub-output). Jika terdapat lebih dari 1 lokasi untuk 1 output/sub-output, agar mengulangi penulisan nama output/sub-output pada kolom 2.
- Kolom 6 dan 7 : diisi berdasarkan estimasi outcome yang akan dicapai. Jumlah penduduk pemanfaat dalam satuan dan luas wilayah tertangani dalam hektar.
- Kolom 8 : diisi siap atau tidaknya Strategi/Rencana Pembangunan infrastruktur dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, termasuk Struktur Ruang Wilayah dalam RTRW.
- Kolom 9 dan 10 : diisi tahun selesainya penyusunan Studi Kesiapan (Feasibility Study) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- Kolom 11 dan 12 : diisi tahun selesainya penyusunan DED dan tahun siapnya lahan yang dibutuhkan.
- Kolom 15 dan 16 : diisi volume dan total biaya sampai output selesai dihasilkan secara menyeluruh.
- Kolom 17, 18, 19, dan 20 : diisi volume beserta biaya rupiah murni dan PHLN untuk pelaksanaan tahun 20...
- Kolom 21 dan 22 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20.. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 23 dan 24 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20.. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 25 dan 26 : diisi volume dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 20.. (untuk pekerjaan berlanjut/multi tahun).
- Kolom 4-13 dan 15-16 : diisi untuk pekerjaan fisik.
- Kolom 27 : diisi keterangan Output terkait merupakan Kegiatan Pusat (Pusat) / Dekonsentrasi (Dekon) / Tugas Pembantuan (TP) / Urusan Bersama (UB) / Multiyears (MYC).


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 22

Lampiran 9.6

Form Penilaian Usulan Kegiatan Fisik TA. 20.. (Contoh)

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

 FORM PENILAIAN USULAN KEGIATAN FISIK TA. 20... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
PROGRAM	:
KEGIATAN	:
OUPUT	:
SATKER/BALAI	:
JUDUL PAKET	:
LOKASI	: PROVINSI : ; KAB/KOTA : ; DETIL LOKASI :
ALOKASI ANGGARAN	Rp
<u>DESKRIPSI KONDISI EKSTING / PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / KEBUTUHAN</u>	
<u>PENILAIAN KELAYAKAN DAN KESIAPAN :</u>	
- Kelengkapan Perencanaan/Desain	
- Rencana Tata Ruang Wilayah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak dipertimbangkan
- Perencanaan Jangka Menengah / KPJM	<input type="checkbox"/> Terprogr m <input type="checkbox"/> Kebijakan baru
- Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS)	<input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Tidak layak <input type="checkbox"/> Tidak dilakukan
- Hasil AMDAL	<input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Tidak layak <input type="checkbox"/> Tidak dilakukan
- Detil Engineering Design (DED)	<input type="checkbox"/> Siap <input type="checkbox"/> Akan siap tahun

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 22



**FORM PENILAIAN USULAN KEGIATAN FISIK TA. 20...
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Kesiapan Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Siap Akan siap tahun ... Tidak diperlukan tahun ...
- **Ketersediaan dan Kesiapan Lahan** Siap Akan siap tahun

DUKUNGAN SUMBER DANA LAIN :

- **APBN Kementerian Lain :**
Alokasi Anggaran : Rp;
untuk pekerjaan
- **APBD Provinsi/Kabupaten/Kota :**
Alokasi Anggaran : Rp;
untuk pekerjaan
- **Swasta :**
Alokasi Anggaran : Rp;
untuk pekerjaan

OUTCOME YANG DIHARAPKAN :

- **Sasaran Fungsional :**
 - Target Jumlah Penduduk Terlayani/Pemanfaatan : Orang
 - Luas Wilayah Terlayani :
- **Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja :** Orang

Catatan Penilaian :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 22 dari 22

Lampiran 9.7

DAFTAR SIMAK

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-54 Rev:00)

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Usulan Program.			
2.	Penyusunan Usulan Program dilaksanakan oleh masing-masing Sub Direktorat dan masing-masing Bidang/Seksi di lingkungan Balai.			
3.	Subdit Pemrograman dan Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan pada Balai telah melaksanakan kompilasi Usulan Program.			
4.	Direktur Terkait/Kepala Balai telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Program.			
5.	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan telah mengkompilasi Usulan Program hasil rapat koordinasi.			
6.	Telah dilaksanakan Pra Konsultasi Regional.			
7.	Hasil Pra Konreg telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.			
8.	Telah dilaksanakan Konsultasi Regional (Konreg).			
9.	Keluaran Konreg merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja.			
10.	Rencana Kerja telah disusun dengan Aplikasi KRISNA			
CATATAN :				

Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat